



LAPORAN HASIL PENELITIAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BAGI HASIL
DI KABUPATEN PATI (STUDI KASUS DI BEBERAPA DESA)

UPT-PUSAT K-UNDIP
No. Dsr: 1907/KI/PA
: 1-10-1996

OLEH :
SUTEKI, S.H., DKK.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
1 9 9 6

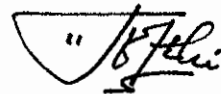
Dibiayai oleh DIP Bagian Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas
Universitas Diponegoro, Nomor 097/XXIII/3/-/1995 Tanggal 28 Maret 1995
Berdasarkan Surat Perjanjian Tugas Pelaksanaan Penelitian
Para Tenaga Pengajar Universitas Diponegoro
Nomor 120 C/PT09.OP/B/1995, Tanggal 1 September 1995

(7)

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Undang-undang
Bagi Hasil di Kabupaten
Pati (Studi Kasus di Bebe-
rapa Desa).
b. Macam Penelitian : Untuk Menunjang Pembangunan
c. Kategori : II
2. Kepala Proyek Penelitian
 - a. Nama : Suteki, SH
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda/IIIIa/ 132102189
 - d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
 - e. Fakultas/Bagian : Hukum / Hukum dan Masyarakat
 - f. Universitas : Universitas Diponegoro
 - g. Bidang Ilmu diteliti : Ilmu Hukum
3. Jumlah Tim Peneliti : 4 (empat) orang
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Pati- Jawa Tengah
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan.
6. Biaya yang diperlukan : Rp 2.520.000,00 (Dua Juta Lima
Ratus Duapuluh Ribu Rupiah)
7. Dibiayai melalui Proyek : OP dan F

Semarang, Pebruari 1996
Kepala Proyek Penelitian

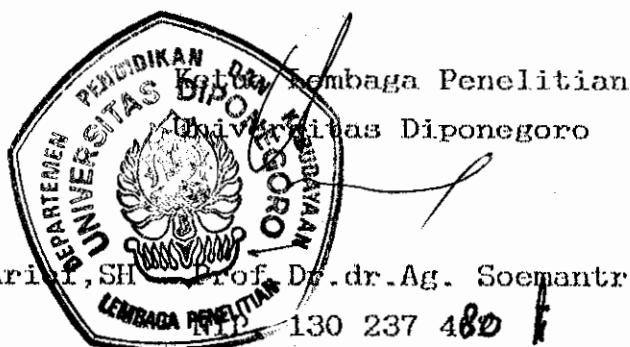


S u t e k i, S H
NIP. 132 103 189

Mengetahui :



Dekan
Fakultas Hukum UNDIP
Barda Nawawi Arif, SH, Prof. Dr. dr. Ag. Soemantri
NIP. 130 350 519



ABSTRAK

Penelitian hukum sosiologis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil di Kabupaten Pati (Studi Kasus di Beberapa Desa) ini dimaksudkan untuk :

1. Mengungkapkan pola-pola bagi hasil pada beberapa desa di Kabupaten Pati.
2. Untuk menemukan hukum yang digunakan oleh petani dalam bagi hasil sehubungan dengan UU No. 2 Tahun 1960.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa UU No. 2 Tahun 1960 tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini disebabkan :

1. Tidak adanya komunikasi hukum.
2. Kebiasaan masyarakat yang tidak mendukung.
3. Kurangnya kemauan pemerintah (political will).
4. Pola bagi hasil tergantung pada konsep pasar (permintaan dan penawaran).

ABSTRACT

This socio-legal research on Implementation of Sharing act (UU No. 2 Tahun 1960) in Pati Regency (Study Case Several Villages) has same goals :

1. To reveal about the sharing agreement type in Pati.
2. To find the law that is used by the farmers in sharing agreement and its influence factors.

This research is done in Pati Regency. The Quantitative research method is used in this research. There are same conclusions have taken from this research. The Sharing Act couldn't be implemented in area research because same factors :

1. There is no legal-communication about it;
2. The farmer's custom (legal culture) ;
3. Government political will ;
4. Sharing agreement type is defined by market concept (supply and demand in land owner and worker).

SUMMARY

IMPLEMENTATION OF THE SHARING ACT IN PATI REGENCY - CENTRAL OF JAVA (STUDY CASE ON SEVERAL VILLAGES)

by

Suteki, Abdul Jalil, Edy Sismarwoto,
Dyah Wijaningsih.

Faculty of Law
Diponegoro University

The topic of this research is Implementation of Sharing Act in Pati Regency - Central of Java (Study Case on Several Villages). This research is done to provide information about Sharing Act (UU No. 2 Tahun 1960) implementation and its influence factors. Quantitative Research Methode is used in this study case research.

The results showed that implementation of Sharing Act in farming is influenced by several factors. Those factors are :

- (1). Legal (order) factor ;
- (2). Law enforcer factor ;
- (3). Government plitical will factor ;
- (4). Legal communication factor ;
- (5). Legal cultur (society custom) factor.

It was concluded that the farmers were chosed sharing type themself, it couased they didn't understood about sharing agreement order.

(LP, Universitas Diponegoro, Kontrak : 120/PT09.OP/B/1995 tanggal 1 September 1995).

KATA PENGANTAR

Tidak berlebihan kiranya apabila pada kesempatan ini kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas ridhonya semata penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil di Kabupaten Pati (Studi Kasus di Beberapa Desa) ini dapat dilaksanakan atas bantuan dari berbagai. Untuk itu pada lembar ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.dr.Ag. Soemantri, sebagai Ketua Lemlit UNDIP yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan penelitian melalui dana OP dan F ini.
2. Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, SH selaku Dekan Fakultas Hukum UNDIP yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Perangkat Desa Jepatlor (Kec. Tayu) dan Karangmulyo (Kec. Tambakromo) yang telah membantu pengumpulan data pada penelitian ini.

Meskipun penelitian ini telah selesai, kami menyadari bahwa masih banyak ketidaksempurnaan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini. Untuk itu saran serta kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Semarang, Pebruari 1996

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Lembar Identitas dan Pengesahan	
Ringkasan dan Summary	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	

I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Bagi Hasil	5
1. Dasar Peraturan Bagi Hasil Tanah Pertani-	
an	5
2. Beberapa Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil.	5
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan	
Peraturan Perundang-undangan	9
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	14
IV. METODE PENELITIAN	15
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Umum Daerah Penelitian	19
B. Pelaksanaan UUBH di Desa Jepatlor (Tayu)	
dan Desa Karangmulyo (Tambakromo)	19
1. Pelaksanaan UUBH di Desa Jepatlor	23
2. Pelaksanaan UUBH di Desa Karangmulyo	26
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	29
B. Saran	29

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Jepatlor dan Desa Karangmulyo Menurut Tingkat Pendidikannya.
- Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencahariannya.
- Tabel 3. Jenis Irigasi Desa Jepatlor dan Karangmulyo.
- Tabel 4. Jumlah Perjanjian Bagi Hasil di Desa Jepatlor.
- Tabel 5. Alasan Pemilik Dalam Bagi Hasil (Jepatlor).
- Tabel 6. Pola Imbangan Bagi Hasil di Desa Jepatlor.
- Tabel 7. Pola Imbangan Bagi Hasil di Desa Karangmulyo.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993, dilaksanakan melalui empat aspek pembangunan nasional yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik dan aspek pertahanan dan keamanan. Pembangunan pada aspek ekonomi dilaksanakan melalui 18 sektor. Salah satu dari sektor tersebut adalah sektor pertanian. Pembangunan pada sektor pertanian ini sudah selayaknya mendapat perhatian yang besar. Hal ini mengingat sektor ini masih menjadi faktor penentu bagi pembangunan nasional secara keseluruhan.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial, telah merasuk ke segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya kehidupan ekonomi dalam hal ini sektor pertanian. Undang-Undang Bagi Hasil (di singkat UUBH) yakni UU No. 2 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya, merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan pembangunan pada sektor pertanian dalam rangka untuk menyamakan persepsi, menertibkan masalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan akhirnya diarahkan agar petani penggarap (yang pada umumnya miskin) meningkat pendapatannya.

Upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan, dapat ditempuh dengan peningkatan pendapatan, antara lain oleh pemerintah ditempuh melalui pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil. Hal ini sesuai dengan isi dari konsiderans UUBH, yang pada dasarnya mempunyai dasar pertimbangan keadilan mengenai pembagian hasil tanah, antara pemilik dan penggarap tanah.

Dalam rangka untuk melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat dalam praktek perjanjian

bagi hasil ini, maka di bidang agraria diadakanlah ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar adil disamping dengan ditegaskannya tentang hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap yang biasanya berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarap sangat banyak.

Besarnya bagian bagi hasil yang menjadi hak masing-masing pihak pada kenyataannya tidak terdapat keseragaman, karena hal itu secara sosiologis tergantung pada tanah yang tersedia, banyaknya penggarap yang menginginkannya, keadaan kesuburan tanahnya maupun kekuatan kedudukan pemilik tanah dalam masyarakat setempat. Berkaitan dengan kenyataan yang menunjukkan bahwa pada umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat banyak maka sering kali penggarap terpaksa menerima syarat-syarat perjanjian yang memberikan hak kepadanya atas bagian yang sangat tidak sesuai dengan biaya dan tenaga yang telah digunakan untuk mengusahakan tanah garapannya. Ditinjau dari segi jangka waktu perjanjian bagi hasil, umumnya tidak terdapat keseragaman dan berlangsungnya perjanjian tersebut pada umumnya hanya tergantung semata-mata pada kesediaan yang berhak atas tanah, sehingga penggarap tidak mempunyai jaminan akan memperoleh tanah garapan dengan jangka waktu yang layak. Hal ini pada akhirnya akan berpengaruh pada pemeliharaan kesuburan tanah disamping merupakan penyebab mengapa penggarap seringkali menerima syarat-syarat yang berat dan tidak adil.

Ditinjau dari masa berlakunya, UUBH sudah lama diberlakukan, namun demikian UUBH tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif hingga waktu sekarang. Hal ini terbukti dari pengamatan, ternyata masih ada pembagian

hasil tanah dengan perbandingan 1:1 dari hasil kotor, padahal hasil tanah yang dibagi seharusnya hasil tanah bersih, yakni hasil kotor yang telah dikurangi dengan biaya perawatan sampai hasil dipanen. Keadaan yang demikian sudah tentu disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomis maupun faktor yuridis-kultural, sehingga menentukan mengapa petani tersebut tidak mematuhi peraturan dalam UUBH. Kondisi ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan (dalam penelitian ini masyarakat pedesaan di Kab. Pati).

Untuk mengetahui apakah UUBH dapat diterima oleh masyarakat pedesaan atau tidak, apakah masyarakat pedesaan tersebut mencari alternatif lain dalam pembagian hasil tanahnya yang mereka anggap lebih adil dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya serta bagaimana pengaruh pelaksanaan UUBH tersebut terhadap upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan, sekaligus ingin dicari alternatif pemecahan terhadap masalah yang muncul sehingga pelaksanaan UUBH benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani, maka penelitian ini perlu untuk dilakukan, dengan mengambil lokasi di Kabupaten Pati.

Penelitian di pedesaan Kabupaten Pati ini juga diperlukan untuk mengetahui kondisi pertanian (terutama mengenai pelaksanaan UUBH dan masalah yang timbul) di daerah pantai, hal ini mengingat sebagian dari pedesaan Kab. Pati berada di wilayah pantai.

Dalam penelitian ini, masalah yang diajukan dan perlu mendapat pemecahan adalah sebagai berikut :

Masyarakat petani pedesaan, khususnya petani di Kab. Pati belum secara efektif melaksanakan UUBH beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dengan alasan ini ingin diketahui dan dicari solusinya adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan UUBH tersebut.

2. Apakah masyarakat petani pedesaan tersebut memilih pembagian hasil tanah dengan cara lain yang dianggap lebih adil dan apa sebab-sebabnya.

Melalui pertimbangan yang menyeluruh dan karena keterbatasan waktu serta biaya yang tersedia maka pada penelitian ini lebih ditekankan pada studi kasus dengan mengambil sampel sebanyak dua desa pada dua kecamatan yang berbeda (Kecamatan Tayu dan Kecamatan Tambakromo) di Kabupaten Pati. Kendatipun dari hasil penelitian sudi kasus ini tidak dapat ditarik generalisasi, namun diharapkan penelitian ini mampu memberikan referensi bagi penelitian mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang lebih luas sifat maupun ruang lingkupnya.